



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700 / 110 / ITKD

TENTANG

PEMERIKSAAN TERINCI

ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021 PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Terinci.KOBEK/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 Hal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Data/Dokumen Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi TA 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Kepala Perangkat Daerah segera mempersiapkan dokumen dalam rangka pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 15 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

- | | | |
|---------|---|---|
| Kepada | : | Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi; |
| Untuk | : | |
| KESATU | : | Segera memenuhi Permintaan Data dalam rangka Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Bekasi; |
| KEDUA | : | Pemenuhan Dokumen tersebut berupa hard copy yang dikirimkan melalui Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kota Bekasi dan dalam bentuk softcopy melalui email lkpd2021.itko@gmail.com paling lambat hari Kamis tanggal 3 Februari 2022; |
| KETIGA | : | Dalam pemenuhan data yang diminta oleh Tim BPK RI Perwakilan Jawa Barat dan Kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan agar hadir secara pribadi dan/atau menugaskan pejabat yang berkompeten sesuai dengan bidang tugasnya; |
| KEEMPAT | : | Inspektur Kota Bekasi mendampingi Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021; |
| KELIMA | : | Agar melaporkan progres pelaksanaan pemeriksaan dimaksud kepada Wali Kota Bekasi dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kota Bekasi. |

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal :

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,**


Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Lampiran : Instruksi Wali Kota Bekasi
Nomor
tanggal

DAFTAR DOKUMEN
PERMINTAAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

No	Daftar Dokumen	Hardcopy	Softcopy	OPD
A	Akun Neraca (Per 31 Desember 2021)			
1.	Daftar Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (Deviden), Lain-Lain PAD yang Sah, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, dan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 (per WP per jenis Piutang)		√ Excel	BAPENDA BPKAD RSUD DISPERINDAG
2.	Hasil perhitungan saldo Piutang per jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (Deviden), Lain-Lain PAD yang Sah, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, dan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021		√ Excel	BAPENDA BPKAD RSUD DISPERINDAG
3.	Daftar SPTPD/SKPD/dokumen lain yang dipersamakan per 31 Desember 2021		√ Excel	BAPENDA
4.	Daftar SPTRD/SKRD/dokumen lain yang dipersamakan per 31 Desember 2021		√ Excel	BAPENDA
5.	Hasil perhitungan kenaikan/penurunan saldo Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (Deviden), Lain-Lain PAD yang Sah, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, dan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021		√ Excel	BAPENDA BPKAD RSUD DISPERINDAG
6.	SK hapus buku/tagih Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (Deviden), Lain-Lain PAD yang Sah, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, dan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021	√	√ PDF	BAPENDA
7.	Hasil Keputusan RUPS per 31 Desember 2021	√	√ PDF	SETDA Bagian Perekonomian
8.	Daftar Penerimaan Kas atas Pembayaran Kontribusi oleh Pihak Ketiga per 31 Desember 2021		√ Excel	BPKAD Disdagperin
9.	Naskah Perjanjian Pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan Pihak Ketiga 31 Desember 2021	√	√ PDF	BPKAD SETDA Bagian KSI

10.	Naskah Perjanjian Pinjaman dengan Pihak-Pihak Terkait per 31 Desember 2021	√	√ PDF	BPKAD SETDA
11.	Hasil perhitungan saldo piutang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan per 31 Desember 2021		√ Excel	BAPENDA BPKAD RSUD
12.	Daftar Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021		√ Excel	BAPENDA BPKAD RSUD DISPERINDAG
13.	Hasil perhitungan saldo Penyisihan Piutang per jenis Piutang dan Dokumen pendukung perhitungan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021		√ Excel	BAPENDA BPKAD RSUD DISPERINDAG
14.	Hasil Stock Opname Persediaan SKPD per 31 Desember 2021	√	√ Excel	OPD ITKO
15.	Rekapitulasi daftar/rincian Investasi Jangka Panjang Permanen dan Non Permanen per 31 Desember 2021		√ Excel	BPKAD
16.	Daftar Dana Bergulir dan dokumen perhitungan penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2021		√ Excel	BPKAD DISKOPUKM
17.	Dokumen Perjanjian Penyaluran Dana Bergulir, Perda, Peraturan KDH mengenai Dana Bergulir	√	√ PDF	BPKAD DISKOPUKM
18.	Register Utang Belanja, Utang PFK, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang akibat Pemakaian Kekayaan Daerah, Utang Bunga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021		√ Excel	BPKAD
19.	Register kendali pembayaran Utang Belanja, Utang PFK, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang akibat Pemakaian Kekayaan Daerah, Utang Bunga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021		√ Excel	BPKAD
20.	Rekapitulasi (register) Pemungutan dan Penyetoran PFK		√ Excel	BPKAD
21.	Register perjanjian kerjasama pemakaian kekayaan daerah atau perjanjian utang dan Dok. Perjanjian Kerjasama		√ Excel	BPKAD SETDA Bagian KSI
22.	KIB A s.d. F (Per KIB A per SKPD dalam 1 sheet, dst)		√ Excel	BPKAD Seluruh OPD
B LRA/LO Pendapatan TA 2021				
1.	Daftar pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah (sesuai klasifikasi masing-masing)		√ Excel	BAPENDA BPKAD
2.	Perda/Perkada Pajak Daerah, retribusi daerah, dan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	√	√ PDF	BAPENDA BPKAD

3.	Register SKP-D/SPPT/SPTPD, dan SKR-D		√ Excel	BAPENDA
4.	Perjanjian deposito dan Sertifikat obligasi	√	√ PDF	BPKAD SETDA
5.	Perda pembentukan BUMD, Perda penyertaan modal pada BUMD, LK BUMD (audited), dan RUPS	√	√ PDF	SETDA Bagian Perekonomian
6.	Rincian transaksi Dana Perimbangan, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan		√ Excel	BPKAD BAPENDA
7.	Surat perjanjian hibah/NPHD, SK gubernur penerima BOS, Laporan penerimaan BOS	√	√ PDF	DISDIK SETDA KESBANGPOL DISPARBUD DISPORA DINSOS DPPPA ITKO DISPERKIMTAN
C LRA/LO Belanja TA 2021				
1.	Daftar Gaji dan Tunjangan PNS per bulan TA 2021 seluruh SKPD		√ Excel	BPKAD
2.	Daftar gaji dan tunjangan anggota DPRD per bulan TA 2021		√ Excel	SETWAN
3.	Daftar tambahan penghasilan PNS per bulan TA 2021 seluruh SKPD		√ Excel	Seluruh OPD
4.	SK/Perkada tentang besaran Biaya Penunjang Operasional (BPO), TKI, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan reses DPRD TA 2021	√	√ PDF	SETWAN
5.	Daftar tanda terima Biaya Penunjang Operasional (BPO), TKI, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan reses DPRD TA 2021		√ Excel	SETWAN
6.	SK/Perkada tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi TA2021	√	√ PDF	BAPENDA
7.	Daftar pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi per triwulan TA2021		√ Excel	BAPENDA
8.	SK/Perkada tentang Biaya Penunjang Operasional (BPO) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah TA 2021	√	√ Excel	SETDA
9.	SK/Perkada terkait belanja hibah dan Bansos TA 2021	√	√ PDF	BPKAD
10.	Data realisasi Belanja Hibah dan Bansos TA 2021		√ Excel	DISDIK SETDA KESBANGPOL DISPORA

				DISPARBUD DINSOS DPPPA ITKO DISPERKIMTAN
11.	Contact person Belanja Hibah dari OPD, data penerima hibah (nama, jabatan, dan nomor handphone), dan hasil audit KAP atas Belanja Hibah	√	√ PDF	BPKAD ITKO



Plt. WALI KOTA BEKASI,

Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO